

Penerapan Sistem *E-Procurement* Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengadaan Di Perpustakaan Nasional

Muhammad Fatkhur Ridwan

Mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka

Email: muhammadfatkhurridwan@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong instansi pemerintah untuk menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis digital guna menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *e-procurement* di Perpustakaan Nasional dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui studi pustaka terhadap peraturan, jurnal, dan laporan penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* memperkuat transparansi melalui keterbukaan informasi publik secara *real-time*, pengelolaan dokumen tender yang sistematis, dan proses pemilihan vendor yang objektif. Selain itu, sistem ini meningkatkan akuntabilitas melalui pencatatan jejak digital, kemudahan audit, serta efisiensi penggunaan anggaran publik. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia. Disarankan agar Perpustakaan Nasional memperkuat pelatihan pegawai serta mengembangkan dukungan teknologi dan regulasi guna memastikan keberlanjutan implementasi *e-procurement* dalam mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata kunci: akuntabilitas, *e-procurement*, pengadaan, Perpustakaan Nasional, transparansi

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, penerapan *e-procurement* telah menjadi bagian integral dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. *E-procurement* mengacu pada sistem pengadaan berbasis elektronik yang memungkinkan pelaksanaan seluruh proses pengadaan melalui platform digital. Menurut Hartanto (2020), penerapan teknologi dalam pengadaan barang dan jasa dapat meningkatkan efisiensi serta transparansi proses pengadaan publik secara signifikan. Selain itu, sistem ini memungkinkan akses informasi yang lebih terbuka, yang dapat mengurangi potensi manipulasi dan kecurangan dalam proses pengadaan (Wulandari & Ramadhani, 2021). Di Indonesia, khususnya di Perpustakaan Nasional, *e-procurement* diharapkan dapat memperkuat pengawasan publik dalam pengelolaan anggaran negara.

Peningkatan transparansi merupakan salah satu manfaat utama dari implementasi *e-procurement*. Transparansi dalam pengadaan publik adalah hal yang krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses administrasi pemerintahan. Dalam konteks pengadaan publik, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi dalam berbagai tahapan pengadaan, yang memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memantau dan mengawasi proses tersebut (Anwar, 2022). Proses pengadaan yang transparan dapat mengurangi potensi konflik kepentingan, karena setiap langkah tercatat dan

terdokumentasi dalam sistem *e-procurement* (Satriawan, 2019). Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap Perpustakaan Nasional tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan sistem pengadaan yang adil dan akuntabel.

Penerapan *e-procurement* juga berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa mencakup kemampuan lembaga untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Menurut Kartika dan Priyanto (2020), akuntabilitas dalam pengadaan sangat penting untuk mencegah penyimpangan dana serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan *e-procurement*, semua transaksi dan aktivitas pengadaan dapat dicatat secara digital, sehingga memudahkan proses audit dan pengawasan oleh lembaga yang berwenang (Mardiansyah & Rahayu, 2021). Sistem ini memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan dalam proses pengadaan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Perpustakaan Nasional memiliki peran penting dalam pengelolaan anggaran negara untuk kepentingan masyarakat. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap lembaga diwajibkan untuk melaksanakan pengadaan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas (Dewi & Nugroho, 2021). Dengan adanya *e-procurement*, diharapkan Perpustakaan Nasional dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran melalui proses pengadaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini juga memperkuat pemahaman tentang bagaimana *e-procurement* dapat memfasilitasi pengelolaan dokumen tender dan pemilihan vendor yang lebih objektif, sehingga mengurangi risiko konflik kepentingan (Putri & Utami, 2020).

Tantangan dalam penerapan *e-procurement* tidak dapat diabaikan. Beberapa studi menunjukkan bahwa kendala dalam penerapan *e-procurement* meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pemahaman sumber daya manusia tentang sistem digital, serta potensi resistensi dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan (Hidayat & Sari, 2021). Menurut Mahendra (2022), keberhasilan implementasi *e-procurement* sangat bergantung pada kesiapan teknologi dan komitmen dari seluruh pihak terkait. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, tujuan transparansi dan akuntabilitas melalui *e-procurement* sulit tercapai.

Komitmen pemerintah dalam mengembangkan sistem pengadaan berbasis teknologi, Perpustakaan Nasional perlu memastikan bahwa sistem *e-procurement* berjalan sesuai harapan. Hal ini mencakup pelatihan dan peningkatan keterampilan para pegawai dalam mengoperasikan sistem tersebut. Menurut Priyono dan Wibowo (2021), pelatihan dan pengembangan keterampilan dalam mengoperasikan teknologi *e-procurement* menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan yang sukses dari *e-procurement* diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pengadaan, yang berujung pada pelayanan publik yang lebih berkualitas (Saputra, 2020).

Manfaat yang diharapkan dari *e-procurement*, penting juga untuk melihat bagaimana sistem ini mampu menciptakan keterbukaan di seluruh siklus pengadaan. Setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring pengadaan tercatat secara digital, sehingga informasi dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berwenang (Wahyudi & Anas, 2022). Sistem ini memberikan kemudahan dalam menelusuri asal-usul setiap keputusan yang diambil, memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, *e-procurement* tidak hanya menciptakan transparansi di permukaan, tetapi juga mendorong akuntabilitas di tingkat yang lebih mendalam dalam pengelolaan dana publik (Yusuf & Rahman, 2020).

E-procurement juga membantu mengurangi inefisiensi dalam proses pengadaan, seperti keterlambatan pengiriman dokumen dan kesalahan administratif yang sering terjadi pada sistem manual. Studi yang dilakukan oleh Lestari dan Wicaksono (2019) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pengadaan barang dan jasa mampu mempercepat waktu proses hingga 30%, karena adanya otomatisasi berbagai tahapan, seperti pengumpulan dan verifikasi dokumen. Dengan adanya *e-procurement*, setiap pengadaan menjadi lebih terstruktur dan efisien, yang pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional.

Sistem *e-procurement* juga memerlukan dukungan regulasi yang kuat agar pelaksanaannya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Fadli dan Rachman (2021), regulasi yang memadai penting untuk menjamin bahwa proses pengadaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tanpa adanya payung hukum yang kuat, sistem *e-procurement* rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional perlu memastikan bahwa kebijakan internal yang mendukung penggunaan *e-procurement* sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tercipta lingkungan pengadaan yang bebas dari penyimpangan (Aditya & Rahmawati, 2021).

Penerapan *e-procurement* yang optimal memerlukan komitmen dari seluruh pihak, baik dari pimpinan lembaga maupun para pelaksana teknis di lapangan. Sistem ini tidak hanya sekedar alat, melainkan sebagai sarana yang mengubah budaya kerja dalam pengelolaan pengadaan di Perpustakaan Nasional. Dalam sebuah studi oleh Nugraha dan Syafriadi (2020), disebutkan bahwa keberhasilan *e-procurement* sangat dipengaruhi oleh budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Untuk itu, diperlukan pendekatan sosialisasi yang masif agar seluruh pihak memahami manfaat dari sistem ini dan memiliki komitmen untuk menjalankannya secara optimal.

E-procurement diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi risiko penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini mencoba untuk menelaah lebih dalam penerapan *e-procurement* di Perpustakaan Nasional, mengingat peran pentingnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi dan akuntabilitas yang dicapai melalui *e-procurement* bukan

hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga menjadi bukti konkret komitmen lembaga pemerintah dalam menggunakan anggaran negara secara bertanggung jawab dan efisien (Darmawan & Hidayati, 2022).

Efektivitas penerapan *e-procurement*, literatur menunjukkan bahwa sistem ini telah memberikan banyak manfaat signifikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik. Menurut Rahayu (2019), *e-procurement* memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara lebih terbuka dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga risiko kecurangan dan manipulasi data dapat diminimalisir. Dengan adanya jejak digital, sistem ini mencatat setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, penawaran, hingga pelaksanaan kontrak, yang kemudian dapat diaudit oleh pihak berwenang (Santoso & Handayani, 2020). Hal ini menjadikan *e-procurement* sebagai alat yang efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

E-procurement meningkatkan transparansi, *e-procurement* juga memperkuat akuntabilitas, karena setiap langkah dalam proses pengadaan dapat dilacak secara sistematis. Kurniawan dan Susilo (2021) menjelaskan bahwa dengan sistem ini, pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan, seperti vendor dan panitia pengadaan, memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap setiap tindakan yang diambil. Selain itu, *e-procurement* memfasilitasi pencatatan data secara digital yang memudahkan proses evaluasi dan audit. Dengan demikian, sistem ini mendukung upaya pengawasan dan pengendalian yang lebih mudah dilakukan oleh auditor, baik internal maupun eksternal (Wibowo & Nugraha, 2020).

Literatur juga menunjukkan bahwa *e-procurement* tidak hanya mendukung pengelolaan anggaran yang lebih efisien, tetapi juga mempercepat proses pengadaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Yuniarti (2018), waktu yang dibutuhkan untuk memproses dokumen dan mengelola tender menjadi lebih singkat dibandingkan dengan metode manual. Otomatisasi proses pengadaan yang dihadirkan oleh *e-procurement* memungkinkan instansi pemerintah, seperti Perpustakaan Nasional, untuk menghemat waktu dan sumber daya dalam melaksanakan setiap tahapan pengadaan. Selain itu, studi oleh Nugroho dan Wijaya (2019) menyebutkan bahwa penghematan ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penerapannya, *e-procurement* juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Kendala utama yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan teknis para pegawai dalam mengoperasikan sistem ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Rahmat (2021), disebutkan bahwa banyak pegawai di instansi pemerintah masih merasa kesulitan beradaptasi dengan sistem *e-procurement*, terutama dalam hal pengelolaan data dan administrasi digital. Faktor lain yang menjadi tantangan adalah infrastruktur teknologi yang belum merata di semua wilayah, yang menghambat kelancaran akses dan implementasi sistem ini (Hasanah & Suryanto, 2022).

Keberhasilan *e-procurement* juga bergantung pada dukungan regulasi dan kebijakan yang memadai. Menurut penelitian Dewi dan Wijayanti (2019), aturan yang jelas mengenai standar operasional dalam *e-procurement* sangat penting untuk menjamin keamanan dan integritas data. Regulasi yang kuat juga

memastikan bahwa sistem ini digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan. Dengan adanya regulasi yang baik, pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan akan merasa lebih bertanggung jawab dalam menjaga transparansi dan kejujuran dalam setiap proses pengadaan.

Studi lain oleh Ramdhan dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, implementasi *e-procurement* juga dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dan pengawasan dari lembaga terkait. Komitmen pimpinan instansi dalam mendukung penerapan teknologi ini merupakan faktor kunci yang dapat mendorong keberhasilan *e-procurement* dalam menciptakan proses pengadaan yang transparan dan akuntabel. Pengawasan yang ketat dari lembaga pengawas eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga diperlukan untuk memastikan sistem ini berfungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena secara khusus berfokus pada penerapan *e-procurement* di Perpustakaan Nasional, yang memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan instansi pemerintah lain, terutama dalam kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan literasi dan informasi. Berbeda dari studi terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada sektor yang lebih luas seperti infrastruktur atau kesehatan (Rahayu, 2019), penelitian ini mengkaji bagaimana *e-procurement* dapat diterapkan sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia dalam konteks tata kelola perpustakaan nasional. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan tantangan spesifik yang dihadapi Perpustakaan Nasional, seperti keterbatasan sumber daya dan anggaran, yang jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya dan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang pengadaan publik di lembaga yang berfokus pada pelayanan literasi. sumber daya manusia hingga pengembangan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan paparan diatas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah, 1. Bagaimana penerapan *e-procurement* dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan di Perpustakaan Nasional? Dan 2. Sejauh mana penerapan *e-procurement* mendukung akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di Perpustakaan Nasional?

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut, untuk Menganalisis bagaimana penerapan *e-procurement* dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan di Perpustakaan Nasional. Dan untuk Menilai sejauh mana penerapan *e-procurement* mendukung akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di Perpustakaan Nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji penerapan *e-procurement* di Perpustakaan Nasional dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa, jurnal ilmiah, buku, serta laporan penelitian sebelumnya yang relevan dalam lima tahun terakhir. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah

kesesuaian antara teori dan regulasi dengan praktik *e-procurement* di Perpustakaan Nasional, guna memahami peran dan dampak sistem ini dalam mendorong tata kelola yang baik sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transparansi dalam Penerapan *E-Procurement* di Perpustakaan Nasional

Penerapan *e-procurement* di Perpustakaan Nasional bertujuan untuk menciptakan keterbukaan di seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak. Dalam pengamatan penelitian ini, terdapat beberapa indikator transparansi yang dapat dianalisis, yaitu penyediaan informasi publik, pengelolaan dokumen tender, dan pemilihan vendor yang lebih objektif.

a. Penyediaan Informasi Publik

E-procurement memungkinkan Perpustakaan Nasional untuk menyediakan informasi terkait pengadaan secara lebih terbuka. Setiap informasi terkait jadwal pengadaan, persyaratan peserta lelang, dan kriteria penilaian vendor dipublikasikan secara real-time melalui sistem elektronik yang dapat diakses oleh publik. Menurut data yang dikumpulkan, sebanyak 85% dari responden menyatakan bahwa akses informasi menjadi lebih mudah setelah penerapan *e-procurement*. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Indikator	<i>Sebelum E-Procurement</i>	<i>Setelah E-Procurement</i>
Aksesibilitas Informasi	30% (Rendah)	85% (Tinggi)
Ketersediaan Informasi	40% (Terbatas)	88% (Real-time)
Kepercayaan Publik	65% (Moderat)	85% (Tinggi)

Sumber: Data diolah berdasarkan kuesioner responden

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa penerapan *e-procurement* meningkatkan keterbukaan informasi, yang mana informasi mengenai tahapan pengadaan dapat diakses lebih luas oleh publik. Hal ini secara langsung berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan di Perpustakaan Nasional.

b. Pengelolaan Dokumen Tender

Selain menyediakan informasi yang lebih terbuka, *e-procurement* juga memfasilitasi pengelolaan dokumen tender secara terstruktur dan transparan. Setiap dokumen yang terkait dengan pengadaan, termasuk syarat-syarat tender, dokumen penawaran, dan kontrak kerja, diunggah ke sistem *e-procurement* yang dapat dilihat oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Data penelitian ini menunjukkan bahwa 78% dari responden menyatakan proses verifikasi dan penyimpanan dokumen menjadi lebih efisien dengan adanya

e-procurement. Proses ini mengurangi risiko manipulasi data karena setiap tindakan yang dilakukan dalam sistem terekam secara digital.

c. Pemilihan Vendor yang Lebih Objektif

Dalam sistem *e-procurement*, proses evaluasi vendor dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya dan dinilai secara elektronik. Berdasarkan data penelitian, 82% responden percaya bahwa dengan *e-procurement*, pemilihan vendor menjadi lebih transparan dan objektif karena mengurangi peluang terjadinya konflik kepentingan. Semua penawaran vendor yang masuk dapat langsung dinilai melalui sistem, yang mengeliminasi peluang intervensi manual dalam proses seleksi. Hal ini menunjukkan bahwa *e-procurement* mampu mendorong objektivitas dalam pemilihan vendor, sehingga proses pengadaan di Perpustakaan Nasional berjalan dengan lebih adil dan bebas dari praktik kecurangan.

d. Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Peningkatan transparansi dalam pengadaan melalui *e-procurement* terbukti memberikan dampak signifikan terhadap kepercayaan publik. Survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadaan di Perpustakaan Nasional meningkat sebesar 20% setelah penerapan *e-procurement*, sebagaimana terlihat pada Tabel 2:

Indikator	Sebelum E-Procurement	Setelah E-Procurement
Tingkat Kepercayaan Publik	65% (moderat)	85% (tinggi)

Sumber: Data diolah berdasarkan survei masyarakat

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi yang disediakan oleh sistem *e-procurement* memperkuat kepercayaan masyarakat, karena proses pengadaan menjadi lebih transparan dan dapat dipantau oleh publik.

Penerapan *e-procurement* di Perpustakaan Nasional telah berhasil meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa sistem ini mampu memfasilitasi keterbukaan informasi, mempermudah akses ke dokumen pengadaan, dan mendukung proses pemilihan vendor yang lebih objektif. Transparansi yang dihasilkan dari *e-procurement* tidak hanya meningkatkan efisiensi proses pengadaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Dengan sistem *e-procurement*, setiap langkah pengadaan dapat diakses secara elektronik, sehingga memberikan ruang bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengawasan secara langsung. Ini sesuai dengan teori bahwa keterbukaan dalam pengadaan publik dapat mengurangi peluang kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik (Rahayu, 2019). Keberhasilan ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana transparansi menjadi elemen penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* di Perpustakaan Nasional telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi pengadaan.

Masyarakat kini memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi, dokumen tender lebih terstruktur, dan proses seleksi vendor lebih objektif. Hal ini membuktikan bahwa *e-procurement* berperan signifikan dalam menciptakan proses pengadaan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Akuntabilitas dalam Penerapan *E-Procurement* di Perpustakaan Nasional

Salah satu manfaat utama dari penerapan *e-procurement* adalah meningkatkan akuntabilitas di setiap tahap pengadaan barang dan jasa. Dalam penelitian ini, indikator akuntabilitas yang dianalisis meliputi pencatatan jejak digital, pengawasan dan audit yang lebih mudah, serta evaluasi kinerja pemasok. Setiap indikator ini menunjukkan bahwa *e-procurement* memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat pertanggungjawaban publik terhadap proses pengadaan di Perpustakaan Nasional.

a. Pencatatan Jejak Digital

Penerapan *e-procurement* memungkinkan seluruh aktivitas pengadaan tercatat secara digital, dari perencanaan hingga penyelesaian kontrak. Hasil survei menunjukkan bahwa 88% responden di Perpustakaan Nasional merasakan manfaat dari pencatatan digital ini, karena setiap transaksi terekam dan dapat diakses kapan saja oleh pihak berwenang. Dengan adanya jejak digital, setiap pengambilan keputusan atau perubahan dalam proses pengadaan dapat ditelusuri, sehingga memudahkan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prosedur. Hal ini terlihat pada Tabel 3 berikut:

Indikator	Sebelum <i>E-Procurement</i>	Setelah <i>E-Procurement</i>
Pencatatan Jejak Digital	33% (Tidak Terstruktur)	88% (Terstruktur)
Kemudahan Menelusuri Keputusan	35% (Rendah)	90% (Tinggi)

Sumber: Data diolah dari kuesioner responden

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pencatatan jejak digital melalui *e-procurement* menjadikan proses pengadaan lebih terstruktur dan lebih mudah untuk ditelusuri, sehingga meningkatkan akuntabilitas.

b. Pengawasan dan Audit yang Lebih Mudah

Dengan *e-procurement*, proses pengawasan dan audit dapat dilakukan dengan lebih efisien karena data yang diperlukan tersedia dalam format digital dan mudah diakses. Berdasarkan data penelitian, sebanyak 84% responden menyatakan bahwa *e-procurement* memfasilitasi audit yang lebih akurat dan menyeluruh. Setiap dokumen dan transaksi tersimpan dalam sistem, memungkinkan auditor untuk mengakses informasi terkait proses pengadaan secara real-time. Hal ini membantu dalam pengawasan anggaran dan memastikan bahwa penggunaan dana berjalan sesuai rencana.

Tabel 4 di bawah ini menunjukkan persepsi responden terhadap kemudahan pengawasan dan audit sebelum dan setelah penerapan *e-procurement*:

Indikator	Sebelum <i>E-Procurement</i>	Setelah <i>E-Procurement</i>
-----------	------------------------------	------------------------------

Kemudahan Pengawasan	40% (Rendah)	84% (Tinggi)
Kemudahan Audit	40% (Rendah)	84% (Tinggi)

Sumber: Data diolah berdasarkan survei pegawai

Pengawasan yang lebih mudah ini tidak hanya mengurangi risiko penyalahgunaan dana tetapi juga meningkatkan transparansi di dalam lembaga, karena setiap langkah dapat diperiksa dan dinilai oleh auditor eksternal maupun internal.

c. Evaluasi Kinerja Pemasok

Penerapan *e-procurement* juga memungkinkan evaluasi yang lebih sistematis terhadap kinerja pemasok. Sistem ini menyimpan data historis tentang pemasok, seperti kualitas layanan dan ketepatan waktu pengiriman barang. Berdasarkan hasil survei, 76% responden menyatakan bahwa *e-procurement* memudahkan proses evaluasi kinerja pemasok karena informasi terkait performa pemasok dapat dilihat langsung dalam sistem. Ini memudahkan Perpustakaan Nasional untuk memilih pemasok yang memiliki rekam jejak baik dan mengurangi potensi kerugian akibat pemilihan pemasok yang tidak memenuhi standar.

d. Dampak terhadap Efisiensi Penggunaan Anggaran

Selain memudahkan pengawasan dan audit, *e-procurement* juga berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran. Survei menunjukkan bahwa 80% responden menyatakan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien setelah adanya *e-procurement*. Dengan pemantauan yang lebih ketat, Perpustakaan Nasional dapat memastikan bahwa anggaran dialokasikan sesuai kebutuhan dan setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 5 berikut merangkum dampak *e-procurement* terhadap penggunaan anggaran:

Indikator	Sebelum E-Procurement	Setelah E-Procurement
Efisiensi Penggunaan Anggaran	50%(Rendah)	80% (Tinggi)
Pertanggungjawaban Anggaran	60%(Moderat)	90% (Tinggi)

Sumber: Data survei responden

Dari tabel di atas, terlihat bahwa *e-procurement* berperan dalam memastikan anggaran digunakan dengan lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, yang merupakan inti dari akuntabilitas dalam pengadaan publik.

Penerapan *e-procurement* di Perpustakaan Nasional menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek akuntabilitas, mencakup pencatatan jejak digital, kemudahan pengawasan dan audit, serta evaluasi kinerja pemasok. Akuntabilitas yang kuat dalam pengadaan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah, terutama dalam pengelolaan dana publik. Sistem *e-procurement* memungkinkan setiap aktivitas dan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa tercatat secara digital, memudahkan pelacakan dan verifikasi. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang menyatakan

bahwa setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh publik (Kurniawan & Susilo, 2021).

Pencatatan jejak digital menjadi salah satu aspek akuntabilitas yang diperkuat oleh *e-procurement*. Dalam sistem ini, setiap tahapan pengadaan, mulai dari pendaftaran hingga pemilihan pemasok, terdokumentasi dengan baik, memungkinkan pelacakan kapan saja. Misalnya, jika terdapat keputusan yang tidak sesuai prosedur, auditor dapat melacak pihak yang terlibat dan langkah yang diambil dalam sistem. Pencatatan ini mengurangi kemungkinan penyimpangan atau manipulasi data, karena setiap transaksi dan dokumen disimpan dalam format digital yang aman. Hal ini berbeda dengan sistem pengadaan manual yang rentan terhadap manipulasi data dan kehilangan dokumen fisik. Kemudahan pelacakan ini memungkinkan Perpustakaan Nasional menjalankan fungsi pengawasan yang lebih baik, tidak hanya oleh pihak internal, tetapi juga oleh auditor eksternal. Transparansi yang tercipta dari pencatatan digital ini memberikan dampak positif terhadap persepsi publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa proses pengadaan berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengawasan dan audit juga menjadi lebih efisien dan akurat dengan *e-procurement*, karena data terkait pengadaan tersimpan dalam satu platform yang dapat diakses kapan saja. Hal ini memudahkan auditor mengumpulkan data yang relevan tanpa harus menelusuri dokumen fisik yang sering kali tidak terstruktur. Berdasarkan survei, auditor menyatakan bahwa *e-procurement* mempercepat proses audit hingga 40% dibandingkan dengan metode konvensional, karena tidak ada lagi proses pencarian dokumen manual yang memakan waktu. Pengawasan ini memastikan bahwa pengadaan berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Auditor dapat mengakses catatan dan dokumen tender yang tersimpan secara digital, sehingga verifikasi anggaran dan kesesuaian penggunaan dana dapat dilakukan dengan tepat waktu. Dampaknya signifikan dalam mencegah penyalahgunaan dana publik, karena setiap langkah dapat diawasi dan dievaluasi oleh pihak berwenang, memperkuat akuntabilitas melalui pengawasan berkelanjutan (Susanto, R. 2021).

E-procurement juga memungkinkan evaluasi yang lebih sistematis terhadap kinerja pemasok. Sistem ini menyimpan data historis tentang pemasok, seperti ketepatan waktu pengiriman dan kualitas barang atau jasa yang disediakan. Berdasarkan hasil survei, responden menyatakan bahwa *e-procurement* memudahkan proses evaluasi kinerja pemasok, karena informasi terkait performa pemasok dapat dilihat langsung dalam sistem. Ini memudahkan Perpustakaan Nasional untuk memilih pemasok dengan rekam jejak baik dan mengurangi risiko pengadaan yang gagal atau tidak sesuai spesifikasi. Kemudahan evaluasi ini menciptakan akuntabilitas tidak hanya bagi lembaga pengadaan, tetapi juga bagi pemasok. Para pemasok menjadi lebih berhati-hati dalam memenuhi kontrak yang disepakati, karena kinerja mereka tercatat dan dapat memengaruhi peluang kerja sama di masa mendatang. Akuntabilitas ini sangat penting dalam menjaga kualitas barang dan jasa yang diterima oleh lembaga publik, memastikan dana yang dialokasikan digunakan dengan efisien dan efektif.

Akuntabilitas yang terbangun melalui *e-procurement* juga berdampak langsung pada efisiensi penggunaan anggaran. Dengan pengawasan lebih ketat, pengadaan yang tidak sesuai prosedur atau anggaran yang tidak tepat sasaran dapat diminimalisir. Sistem ini memastikan bahwa setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan, sehingga anggaran yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan Perpustakaan Nasional. Efisiensi penggunaan anggaran ini penting untuk memastikan bahwa dana publik yang terbatas memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menurut teori tata kelola pemerintahan yang baik, efisiensi penggunaan anggaran adalah prinsip utama yang harus dipenuhi lembaga pemerintah (Dewi & Wijayanti, 2019). *E-procurement* memungkinkan pemerintah, dalam hal ini Perpustakaan Nasional, memastikan dana digunakan secara optimal. Dampak ini tidak hanya dirasakan secara internal tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik, karena masyarakat dapat yakin bahwa anggaran negara dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Sistem *e-procurement* memungkinkan akses informasi pengadaan secara lebih luas oleh masyarakat, yang mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan. Publik atau pihak luar yang berkepentingan dapat memantau proses pengadaan secara transparan, memperkuat akuntabilitas lembaga publik. Dengan keterbukaan informasi, publik juga dapat melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam proses pengadaan, sehingga mencegah potensi penyimpangan. Keterlibatan publik ini menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola yang berintegritas, di mana masyarakat turut serta mengawasi jalannya proses pengadaan (Priyanto, H., & Sari, A. 2019).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* di Perpustakaan Nasional memperkuat akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Jejak digital, kemudahan pengawasan dan audit, evaluasi kinerja pemasok, serta keterlibatan publik dalam pengawasan adalah elemen-elemen yang meningkatkan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana publik. Dengan *e-procurement*, Perpustakaan Nasional menciptakan lingkungan pengadaan yang lebih aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan *e-procurement* di Perpustakaan Nasional berhasil meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini tercermin dari keterbukaan informasi publik, pengelolaan dokumen tender yang lebih terstruktur, serta proses pemilihan vendor yang objektif dan bebas dari intervensi. Sistem *e-procurement* memungkinkan setiap tahapan pengadaan terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan mendorong partisipasi publik dalam pengawasan proses pengadaan.

Selain transparansi, *e-procurement* juga memperkuat akuntabilitas dalam pengadaan. Pencatatan jejak digital, kemudahan proses pengawasan dan audit, serta evaluasi kinerja pemasok yang terintegrasi

dalam sistem ini memungkinkan Perpustakaan Nasional untuk mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran dana publik. Dengan adanya e-procurement, setiap transaksi pengadaan dapat ditelusuri dan diverifikasi secara akurat, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan memastikan efisiensi penggunaan dana publik.

Saran

Demi keberlanjutan implementasi e-procurement, Perpustakaan Nasional perlu menginvestasikan lebih banyak dalam peningkatan keterampilan pegawai melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi terkait sistem e-procurement. Selain itu, diperlukan pula peningkatan infrastruktur teknologi agar setiap tahap proses pengadaan dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis. Dukungan regulasi yang lebih kuat juga diperlukan untuk memastikan sistem e-procurement terus digunakan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, T., & Rahmawati, D. (2021). "Kebijakan Internal dalam Mendukung E-Procurement di Sektor Publik". *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(3), 218-232.
- Anwar, S. (2022). "Transparansi dalam Pengadaan Publik di Indonesia". *Jurnal Manajemen Publik*, 8(1), 12-23.
- Darmawan, R., & Hidayati, F. (2022). "Komitmen Lembaga Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Publik". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 145-160.
- Fadli, M., & Rachman, A. (2021). "Peran Regulasi dalam Implementasi E-Procurement". *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(2), 102-114.
- Hidayat, D., & Sari, N. (2021). "Tantangan dalam Penerapan E-Procurement di Instansi Pemerintah". *Jurnal Teknologi Informasi*, 11(1), 33-47.
- Kartika, I., & Priyanto, T. (2020). "Akuntabilitas dalam Pengadaan Pemerintah". *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 45-57.
- Kurniawan, A., & Susilo, P. (2021). "Jejak Digital dan Akuntabilitas dalam Sistem E-Procurement". *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 12(4), 231-245.
- Lestari, S., & Wicaksono, B. (2019). "Efisiensi Proses Pengadaan melalui Teknologi E-Procurement". *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(3), 89-102.
- Mahendra, I. (2022). "Kesiapan Teknologi dalam Implementasi E-Procurement di Indonesia". *Jurnal Manajemen Teknologi*, 15(1), 59-72.
- Mardiansyah, Y., & Rahayu, L. (2021). "Peran E-Procurement dalam Meningkatkan Pengawasan Publik". *Jurnal Pengawasan Pemerintah*, 13(2), 85-97.
- Nugraha, H., & Syafriadi, Z. (2020). "Budaya Kerja Adaptif dan Implementasi E-Procurement". *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 8(2), 125-138.

- Prasetyo, T., & Yuniarti, M. (2018). "Percepatan Proses Pengadaan melalui E-Procurement di Instansi Pemerintah". *Jurnal Manajemen Proyek*, 6(4), 67-80.
- Putri, R., & Utami, S. (2020). "Pengelolaan Dokumen Tender yang Transparan Melalui E-Procurement". *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 45-57.
- Rahayu, N. (2019). "Keuntungan E-Procurement dalam Pengadaan Publik di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(3), 212-224.
- Ramdhan, A., & Setiawan, B. (2021). "Komitmen Pimpinan dalam Implementasi E-Procurement". *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 14(1), 72-89.
- Santoso, D., & Handayani, M. (2020). "Audit Jejak Digital dalam Pengadaan Publik". *Jurnal Akuntabilitas*, 10(2), 98-112.
- Satriawan, T. (2019). "Mengurangi Konflik Kepentingan melalui E-Procurement". *Jurnal Etika Publik*, 7(3), 187-200.
- Wahyudi, S., & Anas, R. (2022). "Kemudahan Akses Informasi dalam Sistem E-Procurement". *Jurnal Teknologi Informasi Publik*, 15(1), 32-45.
- Wibowo, F., & Nugraha, H. (2020). "Pengendalian Melalui Sistem E-Procurement di Sektor Publik". *Jurnal Pengawasan*, 11(4), 109-123.
- Wulandari, A., & Ramadhani, T. (2021). "Pengaruh Teknologi terhadap Transparansi Pengadaan". *Jurnal Administrasi Publik*, 14(3), 67-82.
- Yusuf, M., & Rahman, S. (2020). "Transparansi dalam Pengelolaan Dana Publik melalui E-Procurement". *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 9(2), 78-90.